

BAB III

KAJIAN OBJEK PENELITIAN

A. Biografi Prof. DR. H. E. Mulyasa, M.Pd.

Enco Mulyasa, dilahirkan pada tanggal 13 Desember 1962 di Desa Ciranjeng Kecamatan Cigambul Kabupaten Majalengka Jawa Barat sebagai putra penengah dari lima bersaudara dari pasangan Ibu Hj. Rumlina dengan Bapak Djuardi (alm) yang semasa hidupnya menekuni profesinya sebagai guru.¹ Beliau menempuh pendidikan dasar dan menengah di tanah kelahirannya, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada tahun 1986 dan gelar Magister Pendidikan pada tahun 1997 dari IKIP Bandung yang sekarang lebih dikenal dengan UPI Bandung. Pada tahun 2002, beliau memperoleh gelar Doktor Ilmu Pendidikan (S3) dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan predikat *Cum Laude*.²

Pengabdianya dibidang pendidikan dimulai sejak tahun 1985, yaitu menjadi pendidik di beberapa sekolah menengah di Bandung, selain itu beliau juga menjadi asisten dosen di Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan FIP IKIP Bandung. Pada tahun 1988-2005 beliau menjadi dosen IKIP/ Universitas Malang, kemudian pada tahun 2005 menjadi dosen FIP IKIP Malang, pada tahun yang sama juga beliau menjabat sebagai dosen

¹ E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi (Konsep, Karakteristik, Implementasi, dan Inovasi)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), Cetakan kedelapan, hlm. 265.

² E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), Cetakan kesepuluh, hlm. 263.

Kopertis Pascasarjana Universitas Islam Nusantara Bandung.³

Pengalamannya dibidang pendidikan menjadikannya sebagai Guru Besar Manajemen Pendidikan dan Pengembangan Kurikulum pada tahun 2007, dan beliau diamanahi tugas sebagai Ketua Program S2 Magister Manajemen Pendidikan dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UNINUS sejak tahun 2008 sampai sekarang. Pada tahun yang sama juga, beliau menjadi Tim Penilai angka kredit dosen dilingkungan Kopertis Jawa Barat dan Banten, beliau juga menjadi Tim Penilai Buku di Pusbuk, narasumber program bermutu, penilai Forum Ilmiah Guru Tingkat Nasional, penilai Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tingkat Nasional, dan pernah menjadi narasumber Kurikulum 2013.

Beliau juga selalu dipercaya sebagai konsultan, narasumber, dan *Master Trainer* dalam berbagai seminar dan diklat (TOT) baik nasional maupun internasional. Lebih dari 40 buku yang telah dipublikasikan oleh penerbit Nasional dan sudah banyak yang lulus dalam penilaian Pusbuk. Buku terbarunya adalah Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD (2012), Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru (2013), Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013 (2013).⁴

B. Latar Belakang Penyusunan Buku Revolusi Mental dalam Pendidikan

Revolusi mental merupakan program unggulan Presiden dan wakil presiden ke-7, yaitu Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk mewujudkan

³ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), Cetakan Keenam, hlm. 262.

⁴ E. Mulyasa, *Revolusi Mental dalam Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 205-206.

masyarakat yang adil, sejahtera dan bermartabat. Program tersebut harus di dukung dan direalisasikan oleh Kabinet Kerja dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk di bidang pendidikan, bahkan pendidikan itulah yang harus mengawali dan mengawal revolusi mental. Dikatakan demikian karena dunia pendidikan di Indonesia sekarang ini sedang menghadapi tantangan untuk menjawab berbagai perubahan global yang terjadi begitu cepat, seperti perdagangan bebas (*free trade*), tenaga kerja bebas (*free labour*), perkembangan masyarakat informasi, serta perkembangan budaya, seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi, terutama akselerasi transformasi dan teknologi informasi yang sangat dahsyat.

Revolusi mental dalam bidang pendidikan bukanlah hal yang mudah semudah membalikkan telapak tangan, karena pendidikan merupakan hajat hidup seluruh rakyat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan berjumlah lebih dari 250 juta jiwa yang harus dilayani sejak lahir sampai meninggal dunia, baik melalui pendidikan formal ataupun pendidikan nonformal. Secara preventif, revolusi mental bisa dimulai di lembaga pendidikan formal di sekolah, yaitu dimulai dengan melakukan revolusi mental para pendidik, kepala sekolah, dan pengawasnya agar bisa diteladani oleh peserta didik. Melalui revolusi mental pendidik, kepala sekolah dan pengawas diharapkan lembaga-lembaga pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang berakhlakul karimah, karena pada dasarnya generasi emas seperti yang kita harapkan hanya bisa lahir dari pendidik yang emas pula.

Revolusi mental dalam bidang pendidikan harus mampu menanamkan nilai-nilai yang berharga bagi personel pendidikan sebagai bekal bagi mereka untuk memberikan layanan yang optimal kepada peserta didik sehingga mampu melahirkan generasi baru, yakni generasi emas. Revolusi mental juga harus mampu menyinergikan antara ucapan atau kata-kata dengan perbuatan, misalnya para pejabat yang bekerja dan berbuat sesuai dengan janji dan sumpahnya. Untuk kepentingan tersebut, perlunya revolusi mental dalam pendidikan, bahkan pendidikan harus mengawali dan mengawal revolusi mental.

Meskipun demikian, istilah revolusi mental dalam pendidikan bukanlah hal yang baru karena istilah tersebut sudah banyak yang digunakan dalam berbagai perubahan pendidikan. Dengan demikian, penggunaan istilah revolusi mental bisa dikatakan maju, bisa juga dikatakan mundur. Mundur, karena istilah ini sudah lama digunakan, sedangkan dikatakan maju, karena pada kenyataannya revolusi mental belum terwujud dalam kehidupan, termasuk dalam pendidikan. Kerangka inilah yang akhirnya melahirkan buku “Revolusi Mental dalam Pendidikan” yang ditulis oleh Prof. Dr. H. E. Mulyasa, M.Pd.

C. Pokok-pokok Pemikiran Prof DR. H. E. Mulyasa, M.Pd tentang Urgensi Revolusi Mental dalam Pendidikan

1. Urgensi Revolusi Mental dalam Pendidikan

Pembangunan masyarakat dan bangsa yang dilakukan pada saat ini cenderung menerapkan prinsip-prinsip paham liberalisme yang tidak

sesuai dan kontradiktif dengan nilai, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Keadaan ini sudah saatnya dikoreksi. Koreksi yang dilakukan tidak harus menghentikan proses reformasi yang sudah berjalan, melainkan dengan cara mencanangkan revolusi mental, menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan *nation building* baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan.

Istilah “revolusi” digunakan karena Indonesia memerlukan suatu terobosan baru untuk memberantas setuntas-tuntasnya segala praktik buruk yang sudah terlalu lama dibiarkan bertumbuh kembang sejak zaman orde baru sampai sekarang. Revolusi mental beda dengan revolusi fisik karena ia tidak membutuhkan pertumpahan darah, namun usaha ini tetap memerlukan dukungan moril dan spiritual secara komitmen oleh berbagai pihak dan direalisasikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Perlunya revolusi mental dalam pendidikan, antara lain dapat dianalisis dari hal-hal sebagai berikut:

1. Banyaknya penyimpangan disekolah yang tidak sesuai lagi dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan bekal dasar kepada peserta didik dan menyiapkan generasi penerus bangsa yang bermartabat.
2. Perkembangan penduduk yang cepat membutuhkan layanan pendidikan yang optimal, untuk itu diperlukan biaya dan anggaran pendidikan yang besar. Disamping itu, perlu strategi yang tepat agar pendidikan tersebut dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

3. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal dasar sekaligus menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional.
4. Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berlangsung setiap saat, begitu cepatnya perkembangan tersebut sehingga sulit untuk diikuti oleh “mata telanjang”. Hal tersebut tentu saja besar pengaruhnya terhadap sistem pendidikan di sekolah, baik terhadap perencanaan, proses, ataupun hasil pendidikan. Bagaimana sekolah dikondisikan agar dapat mengikuti perkembangan dan perubahan tersebut. Hal ini jelas perlu adanya revolusi mental sebagai bentuk reformasi di sekolah agar dapat mengendalikan percepatan yang terjadi dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga sekolah tetap mampu memberikan bekal dasar kepada peserta didik untuk menyiapkan masa depan yang gemilang.

Revolusi mental di sekolah perlu dilakukan dalam rangka menyiapkan lulusan yang berkualitas. Untuk itulah revolusi mental harus segera diprogramkan secara langsung dan dikelola dengan baik untuk melakukan pembangunan manusia. Dalam hal ini, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan manusia harus digarap supaya terlahir sebuah etos kerja, produktivitas dan daya saing yang kuat. Hal tersebut penting karena dalam era globalisasi sekarang ini, ketika batas-batas negara hilang, kuncinya hanya daya saing, oleh karena itu, pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang berdaya saing, yang siap

berunding, bersanding, bahkan bertanding dengan lulusan-lulusan pendidikan dari negara asing.

2. Prioritas Revolusi Mental dalam Pendidikan

Revolusi mental dalam pendidikan bisa jadi mencakup seluruh aspek dalam bidang pendidikan, namun perlu dipertimbangkan adanya prioritas dan usaha. Prioritas yang perlu diperhatikan dalam revolusi mental dalam pendidikan antara lain, sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas Pendidik

Pendidik merupakan faktor pertama dan utama yang perlu mendapat perhatian dalam revolusi mental, karena baik buruknya suatu kurikulum pada akhirnya bergantung pada aktifitas dan kreatifitas pendidik dalam menjabarkan dan merealisasikan kurikulum tersebut. Demikian halnya dalam mengawal dan mengawali revolusi mental di sekolah, pendidik perlu diberikan kebebasan yang lebih leluasa untuk melakukan berbagai inovasi sesuai dengan visi dan misi sekolah, standar kompetensi, dan sesuai dengan potensi peserta didik. Revolusi mental di sekolah diperlukan terutama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidik, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memahami pentingnya pembelajaran aktif dan kreatif.
2. Mengembangkan pengalaman bersama antara peserta didik dan pendidik.
3. Mengembangkan sikap spiritual dan sikap sosial tingkat tinggi.

4. Mengembangkan kemampuan tingkat tinggi (*higher order thinking skill*)
5. Memupuk tanggung jawab peserta didik dalam proses belajar.
6. Menciptakan situasi yang memungkinkan peserta didik dapat mengemukakan idenya dalam kelompok kecil.
7. Membantu peserta didik dalam mengembangkan ketrampilan sosial dan membangun tim.⁵

b. Revolusi Mental untuk Mengubah Pola Pikir Pendidik

Revolusi mental dalam pendidikan yang efektif dan efisien menuntut pendidik untuk berkreasi dalam meningkatkan manajemen kelas, karena pendidik adalah teladan dan panutan bagi seluruh peserta didik. Pendidik harus siap dengan segala kewajiban, baik yang menyangkut manajemen maupun materi pembelajaran. Pendidik merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya dalam menentukan berhasil atau tidaknya peserta didik dalam belajar. Oleh karena itu, pembelajaran harus sebanyak mungkin melibatkan peserta didik supaya mereka bereksplorasi untuk menggali berbagai potensi yang mereka miliki. Sehubungan dengan itu, maka revolusi mental bagi pendidik sangat diperlukan agar para pendidik mampu menjadi fasilitator dan mitra belajar bagi peserta didiknya.

Tidak semua pendidik menjalani profesinya dengan semangat dan bahagia, karena sebenarnya banyak dari pendidik yang tidak

⁵ E. Mulyasa, *Revolusi Mental dalam Pendidikan, Op. Cit.*, hlm. 30.

berminat dan tidak berniat untuk mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan, namun karena tidak ada pekerjaan lain maka terpaksa menjalankan tugas hanya sebagai batu loncatan semata. Pendidik yang tidak ada semangat dan kurang bahagia dengan profesinya biasanya sering mengeluh dan selalu merasa tidak puas dengan profesinya, pendidik yang seperti ini biasanya melaksanakan pembelajaran tanpa motivasi, mereka hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja.

Maka tidak heran jika saat ini banyak pendidik yang tidak mendidik namun cenderung banyak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap tanggung jawabnya tersebut. Berikut ini terdapat beberapa penyimpangan perilaku sebagai sifat negatif pendidik yang sering dilakukan di sekolah, terutama dalam pembelajaran. sifat negatif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengambil jalan pintas dalam pembelajaran
2. Melaksanakan pembelajaran tanpa perencanaan
3. Menunggu peserta didik berperilaku negatif
4. Menggunakan *Destructive Discipline*
5. Mengabaikan perbedaan peserta didik
6. Merasa diri paling pandai
7. Diskriminatif
8. Memaksa hak peserta didik
9. Melakukan evaluasi tidak berkesinambungan

Padahal seharusnya, pendidik yang seyogyanya menjadi fasilitator bagi peserta didiknya, sedikitnya harus memiliki 7 (tujuh) sikap yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tidak berlebihan dalam mempertahankan pendapat dan keyakinannya.
2. Dapat lebih mendengarkan peserta didik, terutama tentang aspirasi dan perasaannya.
3. Mau dan mampu menerima ide peserta didik yang inovatif dan kreatif.
4. Lebih meningkatkan perhatiannya terhadap hubungan dengan peserta didik seperti halnya terhadap bahan pembelajaran.
5. Dapat menerima *feedback*, baik yang bersifat positif maupun negatif, serta menerimanya sebagai pandangan yang konstruktif terhadap diri dan perilakunya.
6. Toleransi terhadap kesalahan yang diperbuat peserta didik selama proses pembelajaran.
7. Menghargai prestasi peserta didik.⁶

Jika pendidik mampu memiliki ke tujuh sikap tersebut, maka tidak akan ada lagi pendidik otoriter, pendidik diskriminatif, pilih kasih dan tidak akan ada lagi kasus kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan simbolik, atau *bullying* terhadap peserta didik di sekolah.

⁶ E. Mulyasa, *Ibid.*, hlm. 61.

c. Revolusi Mental dalam Pembelajaran

Korban dari sistem pendidikan yang sedang mengalami krisis seperti sekarang ini sebenarnya adalah peserta didik, bukan pendidik. Pada hari pertama peserta didik memasuki sekolah, mereka diliputi berbagai pertanyaan yang harus di jawab oleh para pendidik, namun peserta didik harus segera sadar bahwa sekolahnya bukanlah tempat yang tepat bagi mereka untuk memperoleh jawaban seperti itu. Sekolah bahkan menuntut mereka agar menjadi “peserta didik yang baik”, sekolah hanya mampu melayani peserta didik menurut ukuran yang normal, jika belajar lebih cepat dari sebagian besar peserta didik yang lain, maka ia akan merasa bosan, begitu sebaliknya apabila belajar lebih lambat dari peserta didik yang lain, maka ia akan banyak menderita kerugian.

Keadaan seperti ini tidak boleh berlarut-larut dan berjalan terus menerus, keadaan seperti ini harus segera dilakukan revolusi mental dengan menciptakan suatu cara baru sehingga keingintahuan peserta didik yang bersifat alamiah, perbedaan individual, dan kemampuannya akan mendapat penghargaan yang layak. Pembaruan pembelajaran tidak harus disertai dengan pemakaian teknologi yang serba canggih, dalam rangka pengembangan pendidikan, pendidik, dan pengembangan karir pendidikan seperti tersebut di atas perlu ditekankan pentingnya pengembangan cara-cara baru pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta

didik. Pelaksanaan revolusi mental dalam pembelajaran dapat dilakukan dalam setiap langkah, mulai dari kegiatan eksplorasi, elaborasi, sampai dengan kegiatan konfirmasi dalam proses pembelajaran.

d. Katakan “TIDAK” pada Kekerasan

Sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik untuk menemukan jati dirinya, dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal justru tidak demikian dalam kenyataannya, bahkan tidak sedikit sekolah yang menyestakan dan menjadi ajang kekerasan. Misalnya, dalam Masa Orientasi Siswa (MOS), masih sering terjadi kekerasan dan perploncoan yang dilakukan oleh senior terhadap juniornya.

Dari berbagai sumber yang dibaca oleh Prof. DR. H. E. Mulyasa, M.Pd., dikemukakan bahwa aksi kekerasan atau *bullying* yang menimpa peserta didik baru ketika mengikuti pelaksanaan MOS menunjukkan bahwa terdapat banyaknya kekerasan di lingkungan sekolah. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa sebanyak 84% anak mengalami kekerasan disekolah, angka kasus kekerasan di Indonesia ini lebih tinggi dari Vietnam (79%), Nepal (79%), Kamboja (73%) dan Pakistan (43%). Angka tersebut sudah mempresentasikan kondisi lingkungan sekolah secara umum, sehingga wakil ketua KPAI, Maria Advianti merekomendasikan kebijakan nasional “Sekolah Ramah Anak”

sebagai bentuk komitmen mewujudkan generasi yang damai dan jauh dari kekerasan.⁷

Berbagai kasus di atas menunjukkan bahwa perlu adanya revolusi mental yang berkaitan dengan hakikat, tujuan, pendekatan, dan metode yang digunakan dalam masa orientasi pendidikan, baik disekolah (MOS) ataupun diperguruan tinggi (OSPEK). Untuk kepentingan tersebut, diperlukan adanya kontrol dari berbagai kontrol dari berbagai pihak, terutama bagian kesiswaan/kemahasiswaan yang bertanggung jawab secara langsung dengan kegiatan orientasi tersebut. Kekerasan yang sering terjadi disekolah dan berbagai lembaga pendidikan, pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan simbolik. Ketiga kelompok kekerasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yang dialami oleh peserta didik ini biasanya mudah diidentifikasi, karena kekerasan jenis ini kasat mata, misalnya, badan memar, mata memar, atau bagian tubuh lainnya berdarah. Akibat dari kekerasan fisik juga tidak hanya muka atau hidung memar, tetapi juga mengakibatkan nyawa hilang. Kekerasan ini biasanya terjadi karena pendidik menghukum peserta didik atau senior menghukum junior. Hal tersebut tidak

⁷ KPAI, PIndonesia Peringkat Tertinggi Kasus Kekerasan di Sekolah, www.kpai.go.id/berita/indonesia/-peringkat-tertinggi-kasus-kekerasan-di-sekolah/, hlm. 1.

hanya terjadi di sekolah dasar atau menengah saja, melainkan juga terjadi di perguruan tinggi.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan jenis ini bisa saja terjadi di tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi. Kekerasan ini terjadi melalui kata-kata yang sinis dan kata-kata penghinaan. Misalnya, kata-kata bodoh, tolol, otak udang, dan masih banyak kata-kata kotor yang sering digunakan untuk menyakiti temannya. Kekerasan ini berdampak pada korban, sehingga korban kekerasan merasa rendah diri, kurang percaya diri, dan menjadi pasif.

3. Kekerasan Simbolik

Kekerasan simbolik merupakan kekerasan dalam bentuk pemaksaan budaya kelompok tertentu kepada kelompok lain. Dalam pelajaran olahraga misalnya, jenis olahraga yang diajarkan adalah olahraga kelompok atau kelas tertentu, seperti olahraga basket dipaksakan secara halus kepada kelompok tertentu yang terbiasa dengan olahraga sepak bola.

Melindungi peserta didik dari tindak kekerasan merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan setiap sekolah, karena jika tindak kekerasan disekolah tidak ditangani secara serius maka akan berdampak negatif terhadap kondisi peserta didik, kondisi sekolah, dan lingkungan belajar pada umumnya. Peserta didik yang mengalami kekerasan disekolah akan merasakan emosi negatif, seperti perasaan

tertekan, murung, takut, sedih, dan emosinya tidak terkontrol. Peserta didik sudah merasa tidak tahan terhadap tindak kekerasan yang dialaminya biasanya malas masuk sekolah dan tidak betah disekolah. Hal ini dapat dipahami karena lingkungan belajar yang kurang kondusif akan berdampak pada penurunan semangat dan prestasi belajar peserta didik. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban sekolah terutama peran pendidik untuk menciptakan iklim yang kondusif, aman, dan nyaman bagi peserta didik.

